



P E N E T A P A N

Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Pemohon I;

dan

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Oktober yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tertanggal 16 Oktober 2018 Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 24 Desember 2015 di hadapan seorang penghulu bernama H. RUSLI di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama AKHMAD ZAJULI bin SYAHLANI pada saat itu ayah kandung Pemohon II yang bernama SYAHLANI bin HASYIM telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama MUHTAROM dan RAFIK ZH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai bawah tangan pada nikah bawah tangan dari pernikahan siri/bawah tangan bulan April 2010 dengan seorang wanita bernama HERLINA bin DG. TALA dan telah bercerai secara siri/bawah tangan pada bulan Juli 2015 dan Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0080/AC/2013/PA.Bjm. tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama HUMAIRA SYAFA bin SAHRANI, lahir pada tanggal 18 Maret 2017;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (SAHRANI bin SATTI) dengan Pemohon II (NURUL FARIDAH binti SYAHLANI) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2015 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Hal. 2 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut pada tanggal 18 Oktober 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tertanggal 16 Oktober 2018;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, dan setelah surat Permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi isi surat permohonaannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama SAHRANI (Pemohon I) dengan NIK: 6310060404740005 diterbitkan tanggal 29 Oktober 2012, P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama NURUL FARIDAH (Pemohon II) Nomor: 474/191/BNT/IX/2018 dengan NIK: 6371016809830004 diterbitkan tanggal 09 Oktober 2018 oleh An. Kepala Desa Bunati Sekretaris Desa, Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama NURUL FARIDAH alias NURUL PARIDAH binti SYAHLAN (Pemohon II) Nomor: 0080/AC/2013/PA.Bjm diterbitkan tanggal 31 Januari 2013 oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, Kota Banjarmasin, P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama SAHRANI (Pemohon I) dan NURUL FARIDAH (Pemohon II) Nomor : 474/211/Pem-Des/BNT/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, P.4;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut setelah dicocokkan dan ternyata sesuai serta semua alat bukti tertulis tersebut telah dimeterai kemudian (nazegellen).

Hal. 3 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Kemudian Hakim memberi paraf dan kode pada masing-masing dengan kode P.1 s/d P.4;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

I. MURSALIM bin DAMING, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bersempu dengan Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah dibawah tangan pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon I dan II menikah di Kota Banjarmasin, tetapi saksi tidak menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para pihak yang terlibat pada acara pernikahan tersebut, seperti nama penghulu yang menikahkan, wali nikah, saksi pernikahan, mas kawin sebagai mahar;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai di bawah tangan dari pernikahan di bawah tangan dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa lebih dari setahun bercerai dengan istri pertama bernama Herlina, Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan di Banjarmasin, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Bunati Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab), hubungan sesusuan ataupun hubungan karena perkawinan (semenda);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Hal. 4 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlakukan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

II. SAFRULLAH bin SATTA, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua Pemohon, karena bersaudara kandung dengan Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah dibawah tangan pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon I dan II menikah di Kota Banjarmasin, tetapi saksi tidak menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para pihak yang terlibat pada acara pernikahan tersebut, seperti nama penghulu yang menikahkan, wali nikah, saksi pernikahan, mas kawin sebagai mahar;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai di bawah tangan dari pernikahan di bawah tangan dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa lebih dari setahun bercerai dengan istri pertama bernama Herlina, Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan di Banjarmasin, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Bunati Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab), hubungan sesusuan ataupun hubungan karena perkawinan (semenda);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 5 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlakukan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan di Banjarmasin, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

III. FATIMAH binti TABRANI, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua Pemohon, karena saksi ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah dibawah tangan pada tahun 2015, saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan II menikah di Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan penghulu yang menikahkan, wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II tetapi saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa pernikahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang saksi juga tidak mengetahui siapa namanya dan mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 6 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai bawah tangan atas pernikahan bawah tangan dengan seorang perempuan bernama HERLINA sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa setahun setelah bercerai dengan Herlina, Pemohon I menikah dengan Pemohon II, sedang HERLINA juga sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah juga dikaruniai anak dengan suami terbarunya;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab), hubungan sesusuan ataupun hubungan karena perkawinan (semenda);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan di Banjarmasin, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Hal. 7 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14

Hal. 8 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.4**, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 merupakan akte otentik, diperoleh fakta bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II adalah janda cerai resmi sejak tanggal 31 Januari 2013, karena itu tidak ada halangan Pemohon II dinikahi oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **MURSALIM bin DAMING, SAFRULLAH bin SATTA** dan **FATIMAH binti TABRANI** yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai

Hal. 9 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang pokoknya menerangkan hal-hal berikut :

- Bahwa Pemohon I dan II menikah pada tanggal 24 Desember 2015 di hadapan seorang penghulu bernama H. RUSLI di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama AKHMAD ZAJULI bin SYAHLANI dan dihadiri dua orang saksi bernama masing-masing bernama MUHTAROM dan RAFIK ZH;
- Mas kawin berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai (menurut saksi Ibu Kandung pemohon I);
- Bahwa status Pemohon I berstatus duda cerai bawah tangan pada nikah bawah tangan dari pernikahan siri/bawah tangan, sedang Pemohon II berstatus janda cerai (bukti P.3);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushaharah*;
- Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan di Kota Banjarmasin, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tempat tinggal bersama terakhir, dengan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada gangguan dari pihak ketiga yang memperlmasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan

Hal. 10 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw dari 'Aisyah berikut :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ,

Artinya: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw dari 'Abdullah bin Mas'ud :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al- Arba'ah berikut:

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا : أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ : زَوْجٌ, زَوْجَةٌ, وَلِيٌّ, شَاهِدَانِ, صِيغَةٌ

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan, sebagai berikut :

- Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Instruksi

Hal. 11 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

- Persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- Tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali aqrab (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali ab'ad (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- Perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad

Hal. 12 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan adanya i'tikad baik Para Pemohon untuk membina rumah tangga dan telah pula dikaruniai anak serta tidak ada pula gangguan dari pihak manapun yang memperlmasalahakan keabsahan akad perkawinan antara Para Pemohon, di samping itu, maka menerapkan ketentuan tentang kemestian melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam kasus ini, bertentangan dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat pedesaan dan terisolir seperti desa tempat berdomisilinya Para Pemohon, masih hidup nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih konvensional, yang keabsahan pelaksanaan suatu akad perkawinan tidak dikaitkan dengan batasan umur kecuali dengan alat ukur baligh dan tidak dikaitkan dengan mesti adanya pencatatan perkawinan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini, kemashlahatan dan arti penting dari cukup umur dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikannya, dalam pandangan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam taqnin al-ahkam (kodifikasi hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut), karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturnya terkait. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu

Hal. 13 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



berupa *hifzh almal* (memelihara harta terhadap yang berkaitan dengan hak-hak suami istri, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri) dan berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka berdasarkan metode *istihsan* (Di antaranya, menurut Ibn al-Subki dalam kitab *al-Jam' al-Jawami'* berarti "*udul 'an al-dalil ila al-'adah li al-mashlahah* [berpaling dari ketentuan dalil kepada adat yang shahih [tidak menyimpang] atau nilai-nilai yang tidak menyimpang yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan pertimbangan memelihara kemashlahatan". Lihat: Abi al-'Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Idris bin 'Abd al-Rahman, populer dengan nama al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, [tkp: 'Alam al-Kutub, t.th.], Juz 4, hlm. 146), cukup alasan bagi Hakim untuk melakukan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan karena penerapannya bertentangan dengan, dalam hal ini, kepatutan dan kemanusiaan, sebab jika pasal itu diterapkan dalam kasus ini akan menimbulkan keresahan, ketidakpatutan, dan ketidakadilan. (Lihat: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, [Jakarta: SinarGrafika, 2005], Cet, Ke-2, hlm. 858-859), dan mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Hal. 14 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori voluntair dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2015 di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulawal 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai hakim

Hal. 15 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 700.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 791.000,-

Hal. 16 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd.

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

ttd.

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag,

Hakim Anggota

ttd.

Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 271.000,-

Batulicin, 13 Desember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Hal. 17 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Almuna

Hal. 18 dari 18 hal Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2018/PA.Blcn.